

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PELAKSANAAN KERUKUNAN UMAT  
BERAGAMA: Studi Peran Dan Fungsi Forum Kerukunan  
Umat Beragama (FKUB) Kota Palu

**Sidik Ibrahim**

Institut Agama Islam Negeri Palu

Email: [sidikibrahim64@yahoo.com](mailto:sidikibrahim64@yahoo.com)

**Abstract:**

Harmony is the common goal of both government and religious adherents in Palu which is plural in terms of ethnic group and religion. As it is commonly known that plurality is not only a symbol of strength in society, but also a source of conflict. Based on this, this paper is to examine the effectiveness of policy on religious harmony in Palu by portraying the condition of religious harmony in society and analysing the role of the Inter-Religious Harmony Forum (FKUB) in Palu. It is concluded that, first, harmony in Palu is achieved due to piety of religious adherents. Second, the role of the Inter-Religious Harmony Forum (FKUB) in Palu is still weak. This is caused by the fact that the program is not yet rightly implemented due to the lack of financial support and the organizers do not know exactly their role and task. Third, the Inter-Religious Harmony Forum (FKUB) in Palu do not properly perform its task in driving religious harmony in society.

الانسجام هو الهدف المشترك من الحكومة و أتباع كل دين في بالو التي مجتمعها متنوع من حيث المجموعات العرقية والدينية. كما هو معلوم أن التعددية ليست رمز القوة فقط بل هي أيضا مصدر النزاع في المجتمع. وبناء على هذا، فإن هذا البحث يتناول فعالية السياسة على الانسجام الديني في بالو من خلال تصوير حالة من الانسجام الديني في المجتمع، وتحليل دور منتدى الانسجام الديني (FKUB) في بالو. ويستنتج من ذلك أنه، أولا، ويتحقق الانسجام الديني في بالو بسبب التقوى من أتباع الدين. ثانيا، أن منتدى الانسجام الديني (FKUB) في بالو لا يزال ضعيفا. وهذا بسبب أن البرنامج لم ينفذ بحق نظرا لعدم وجود الدعم المالي وأيضا أن المنظمين لا يعرفون بالضبط دورهم ومهمتهم. ثالثا، منتدى الانسجام الديني (FKUB) في بالو لا يؤديون بشكل صحيح مهمتها في قيادة الانسجام الديني في طبقات المجتمع

**Kata Kunci:** FKUB, peran, kerukunan, pluralisme, agama

## A. Pendahuluan

Keanekaragaman suku, agama, budaya dan adat istiadat adalah kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Namun, keanekaragaman tersebut dapat mengandung kerawanan dan gesekan sosial jika tidak dikelola dengan bijak. Kenyataan di masyarakat bahwa banyak aksi kekerasan yang terjadi melibatkan simbol-simbol kelompok tertentu, khususnya pengrusakan rumah ibadah atau penodaan ritual keagamaan agama tertentu adalah buah dari keanekaragaman yang tidak terkelola dengan baik. Agama yang sejatinya sumber kedamaian yang mengajarkan kasih sayang seringkali digunakan oleh pemeluknya sebagai sekat pemisah yang signifikan dengan pemeluk agama lain, yang acapkali agama tidak lagi tampil dengan penuh kasih sayang tapi justru terkesan intoleran dan anarkis.

Fakta di atas adalah konsekuensi dari penggunaan agama sebagai acuan nilai yang kurang arif dalam bertindak dan bersikap. Penggunaan agama sebagai acuan nilai yang kurang arif dapat mengarah pada konflik dan disintegrasi sosial, maka dari itu diperlukan pemahaman penafsiran terhadap teks dan mengkaji nilai-nilai multikultural yang tersirat dalam teks Agama masing-masing untuk mencari kesamaan yang dijadikan sebagai sumber nilai dalam beninteraksi. Selain itu, sangat mendesak lahirnya mekanisme sosial baik yang lahir secara alamiah ataupun terencana yang dapat menjamin ketertiban dan kerukunan antar umat beragama.

Salah satu upaya dalam melahirkan pemahaman dan mekanisme sosial yang berorientasi kerukunan adalah mengembangkan kebijakan "Politik Kerukunan". Politik Kerukunan dapat terjawantahkan dalam beberapa poin; *pertama*, mendorong terbentuknya majelis agama-agama; *kedua*, membentuk wadah kerukunan antar umat beragama; *ketiga*, mengembangkan kesepahaman di antara pemimpin dan tokoh agama melalui pertemuan dan kontak pribadi; *keempat*, mengembangkan

peraturan perekat yang berfungsi mencegah kemungkinan timbulnya penggunaan agama sebagai system acuan hingga ke tingkat konflik; *kelima*, membentuk mekanisme sosial yang secara alamiah dapat dikembangkan oleh umat beragama.

Dari kebijakan “politik kerukunan” tersebut lahir sebuah wadah kerukunan umat beragama yang disebut Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Forum ini sebagai upaya membentuk toleransi dan kerukunan antar umat beragama untuk mendorong kerjasama yang konstruktif. Sebagai kebijakan pemerintah yang dibuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Kota Palu melalui Kementerian Agama membentuk wadah atau forum tersebut sebagai wadah organisasi sosial keagamaan yang menghimpun seluruh tokoh agama yang dibentuk atas kesamaan Visi dan Misi.

Berdasarkan hal tersebut, maka menarik untuk diteliti bagaimana efektivitas pelaksanaan kebijakan kerukunan umat beragama yang telah diperankan oleh Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Palu dalam menciptakan kerjasama antar umat beragama sehingga kota Palu menjadi kota yang aman dan damai. Dalam pada itu, penelitian ini akan menjawab permasalahan akademik di antaranya; 1) Bagaimanakah kondisi kerukunan umat beragama di Kota Palu? 2) Bagaimanakah peran dan fungsi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dalam pembinaan kerukunan umat beragama di Kota Palu? 3) Bagaimanakah efektifitas kebijakan kerukunan umat beragama di Kota Palu?

Penelitian ini sangat bermanfaat baik secara akademik maupun pengembangan sosial keagamaan. Secara teoritis penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan ilmu-ilmu sosial keagamaan. Sementara secara praktis, penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran terhadap Pemerintah Kota Palu dalam menjaga dan meningkatkan kerukunan umat beragama sehingga tercipta kerjasama sosial untuk pembangunan dan perdamaian.

## B. Kajian Yang Terkait

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi buku yang menunjang dalam pembahasan penelitian ini, buku-buku tersebut antara lain:

1. Buku *Dialog dan Kritik akan Identitas Agama* yang dikarang oleh Abdurrahman Wahid dkk. Buku ini memberikan pandangan terhadap umat beragama secara teologis dan filosofis.<sup>1</sup>
2. *Islam dan Pergumulan Kultur dan Struktur* yang dikarang oleh Faisal Ismail<sup>2</sup>, buku ini membahas tentang keagamaan dan kerukunan. Ini sangat penting bagi perwujudan peningkatan kualitas kerukunan umat beragama.
3. Buku *Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* karangan H.M. Ridwan Lubis<sup>3</sup>. Buku ini memberikan gambaran kepada penulis tentang konsep agama dan bagaimana agama tersebut dipahami untuk membangun kemajemukan dan kerukunan umat beragama.
4. *Contemporary Sociology Theory* karangan Margnet M. Poloma<sup>4</sup> yang memberikan beberap teori sosial yang terkait dengan

---

<sup>1</sup>Abdurrahman Wahid dkk., *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

<sup>2</sup> Faisal Ismail, *Pijar-pijar Islam Pergumulan Kultural dan Struktural*, Jakarta: Litbang Depag RI. 2002.

<sup>3</sup> Ridwan Lubis, *Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Depag RI, Jakarta. 2005.

<sup>4</sup> Magraret M. Paloma, *Comtemporary Socilogy Theory*, Yogyakarta: Yosogama, 1979.

kehidupan sosia dan interaksinya serta system kumunikasi di antara masyarakat khususnya umat beragama.

5. *Politic of Identity, The Challenge of Modern Fundamentalism*, Thomas Meyer.<sup>5</sup> Buku ini mengejawantahkan interaksi pemeluk agama dan budaya kekerasan yang ada dalam setiap agama.
6. *Religion and Social Theory* karangan Bryan S. Tunner.<sup>6</sup> Buku ini membahas teori sosial dan agama dalam kehidupan umat beragama.

### C. Tinjauan Pustaka

Istilah kerukunan berasal dari kata rukun yang diserap dari bahasa Arab yakni *rukun* berarti asas atau dasar. Secara istilah rukun digambarkan bahwa 1) merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, seperti tidak sahnya sembahyang yang tidak cukup syarat dan rukun. 2) Asas yang berarti dasar, sendi semuanya terlaksana dengan baik, tidak menyimpang dari rukunnya. 3) rukun berarti baik dan damai, tidak bertentangan. 4) rukun juga sering dimaknai bersatu hati dan bendapat. 5) merukunkan berarti mendamaikan. 6) kerukunan berarti perihal hidup rukun. 7) rasa rukun artinya kesepakatan atau kerukunan hidup bersama.

Dengan demikian, kerukunan umat beragama berarti perihal hidup rukun hidup dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati dan bersepakat antar umat yang berbeda-beda agamanya atau antar umat dalam satu agama. Dalam terminologi yang digunakan

---

<sup>5</sup> Thomas Meyer, *Politics of Identity The Challenge of Modern Fundamentalism*, Jakarta: Freindrich Ebert Stiftung, 2004.

<sup>6</sup> Bryan S. Turner, *Religion and Social Theory*, Sage Publication Ltd. London, 1991.

oleh pemerintah konsep kerukunan hidup antar umat beragama mencakup tiga kerukunan, yaitu kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

Lain halnya dengan konsep kerukunan dalam pandangan teologis, Hasan Hanafi menyatakan bahwa Islam sebagai agama paripurna tidak hanya mengatur persoalan aspek spiritual, tapi ajaran-ajaran Islam harus diintegrasikan ke dalam jaringan kehidupan sosial.<sup>7</sup> Dalam konteks ini, agama harus diartikan sebagai penyatuan sehingga tauhid berfungsi dalam lembaga sosial politik kemasyarakatan dalam peradaban dan perubahan sosial. Dengan demikian, dalam konsep pluralism agama, kehidupan yang damai dan berkeadilan tidak dapat dibangun melalui modus keberagaman yang absolut. Keberagaman yang absolute akan memunculkan sikap fundamentalisme dalam beragama yang merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh agaman-agama saat ini.<sup>8</sup>

Maka dari itu, agama harus tampil sebagai spirit kasih sayangnya antar umat beragama yang pada gilirannya membuka ruang toleransi dalam masyarakat. Hal ini merupakan pandangan keagamaan yang inklusif yang memberi paham pluarisme antar agama yang lebih dewasa sebagai orang yang beriman.<sup>9</sup> Dalam konteks ini, agama tidak hanya terkesan sebuah dogma yang fasif, akan tetapi menjadi spirit yang kuat yang senantiasa memberikan respons dan transformasi yang fungsional

---

<sup>7</sup> Hasan Hanafi, *Madha Ya'ni al Yasar al-Islami: Al-Yasar al-Islami Kitabat fi al-Nahdla al-Islamiah*. 1981, h. 17.

<sup>8</sup> Thomas Meyer, *Politics of Identity The Challenge of Modern Fundamentalism*, Jakarta: Freindrich Ebert Stiftung. 2004, h. 20.

<sup>9</sup> Luthfi Assyaukanie, *Wajah Liberal Islam di Indonesia*, Jakarta: Jaringan Ilam Liberal, h. 51

terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat yang lebih toleran dan rukun antar sesama.

Sebagai masyarakat yang plural, paham kepelbagian adalah sebuah keniscayaan yang perlu dikampanyekan di masyarakat. Kepelbagian ini menyyaratkan sejumlah nilai dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling tergantung, saling berinteraksi, saling berupaya untuk melaukan konservasi integritas bangsa. Ketiga hal itu berjalan baik apabila kita memiliki pandangan kesederajatan kesetaraan (egalitarianism dan bukan kuantitatif) terhadap masing-masing pihak dari kepelbagian. Seiring dengan konsekuensi habitat kepelbagian tersebut, melekat pula resiko konflik inter dan antar kelompok. Oleh karena itu, konsep kuncinya adalah optimalisasi (bukan maksimalisasi, ada keseimbangan antara perubahan dan konservasi) dan hal ini hanya dapat dicapai apabila masing-masing pihak di bangsa ini mau dan mampu melakukan transformasi, yaitu perubahan transformative dalam berbagai peri kehidupan baik yang terkait nilai-nilai, budaya, pola relasi, sikap dan kebiasaan ataupun wujud ekspresi keyakinan. Dengan demikian seluruh komponen bangsa dapat saling berkolaborasi pada domainnya masing-masing.

Dalam habitat kebelagian ini pula mengharuskan pluralism agama. Pluralisme agama bukan semata ibadah ritual, akan tetapi lebih pada memfungsikan agama berperan dalam HAM, Domokratisasi, Egalitarisme dll. Karena pada hakekatnya, masyarakat yang plural berawal dari masa kenabian yang secara kronologis telah tumbuh pada agama-agama sebelum Islam. Maka Al-quran hanya mengajak kepada seluruh penganut agama-agama untuk mencari titik temu di luar aspek teologis (tauhid). Pluralisme agama dalam Islam yakni konsep tentang kesatuan kenabian. Nabi Muhammad menggambarkan bahwa para nabi sebagai bersaudara, mereka bersaudara bukan dalam keterunan melainkan karena membawa risalah yang sama, agama perdamaian yang berlandaskan kepada Tuhan. Islam mengakui adanya titik temu yang sifatnya esensial dari berbagai

agama, khususnya agama-agama samawi, yakni kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Dalam konteks di atas, maka setiap agama hendaknya mengagendakan beberapa agenda pluralism yakni:

1. Hormat kepada kehidupan, berarti mengakui hak asasi manusia akan hidup, keamanan dan perkembangan bebas kepribadian. Tidak ada hak untuk menganiaya orang lain, tidak ada bangsa, ras dan suku yang berhak membenci atau mendiskriminasikan kelompok lain.
2. Solidaritas dan keadilan, karena pada dasarnya tidak perdamaian di dunia tanpa ada keadilan yang menjadi prinsip bersama. Maka tata ekonomi dan politik harus berlandaskan pada keadilan.
3. Toleransi dan kebenaran, keduanya mutlak diperlukan untuk membangun kehendak hidup yang damai. Komunikasi yang jujur terhadap sikap hormat atas pluralitas harus tumbuh di antara masyarakat dan orang-orang yang mempunyai peran public dalam mempertahankan keutuhan lokal masyarakat.
4. Kesamaan hak dan kedudukan, eksploitasi dan diskriminasi merupakan penghinaan yang paling besar terhadap kemanusiaan. Di mana konteks penciptaan manusia yang sama dan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, menjadi prinsip kesamaan dan kesetaraan setiap warga Negara.

Dengan tertanamnya paham pluralism aktif di tengah masyarakat seperti yang digambarkan di atas, pada gilirannya akan melahirkan sikap toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Poin inilah yang sangat mendasar yang mesti dikampanyekan dalam masyarakat yang sangat hitrogen. Namun tidak hanya sebatas teori, melainkan perlu upaya serius



untuk memasyarakatkan paham sikap toleransi dan kerjasama antar umat beragama dalam bentuk aksi dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, ada beberapa poin aksi nyata dari masyarakat sebagai bentuk toleransi dan kerjasama, yaitu:

1. Hubungan lintas agama

Pemeluk agama-agama harus mengakui keberadaan agama lain sebagai sebuah fakta yang harus dihormati bersama. Demikian pula terhadap rasul dan kitab suci tiap agama telah ada sejak dahulu kala. Maka dari itu, yang diperlukan adalah bukan untuk mencari pertentangan antar agama-agama, melainkan membangun budaya dialog dan sharing informasi untuk mencari kesamaan dan mengedepankan kesamaan tersebut dalam berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari.

2. Interaksi sosial antar umat beragama

Dari hubungan lintas agama akan melahirkan interaksi sosial antar umat beragama. Dalam interaksi tersebut yang dikedepankan adalah bukan aspek teologis melainkan aspek kemanusiaan, aspek kebangsaan.

3. Alternative Etika Kehidupan Umat Beragama

Sesuai realitas keindonesiaan, baik konstitusional maupun cultural kehidupan warga bangsa Indonesia, maka pluralism religious dan kultura mutlak harus diterima. Guna mendinamiskan iklim kebersamaan dalam keberagaman agama yang dianut umat masing-masing menuju suasana hidup berdampingan, perlu diintensifkan upaya moderasi pemahaman umat terhadap ajaran agama masing-masing dan pengembangan sikap toleransi (*al-tasamuh al-diny*).

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Palu. Pertimbangan yang mendasari kota Palu sebagai lokasi penelitian, karena kota Palu merupakan penduduk yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku, etnis, budaya dan agama. Terbukti bahwa dengan pengelolaan keragaman agama yang dilakukan secara harmonis, maka kota Palu meskipun diguncang dengan isu-isu yang memakai symbol agama, akan tetapi umat beragama tetap membangun komitmen untuk melakukan kerjasama. Isu-isu yang memakai symbol agama itu dilakukan dalam bentuk kekerasan pembunuhan antar sesama manusia yang beragama, pengrusakan rumah-rumah ibadah, pemboman dan penembakan merupakan pertimbangan utama sehingga kota Palu dijadikan sebagai lokasi penelitian.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan para responden dan informan yang bersifat kualitatif dan berasal dari angket yang disebarkan kepada sejumlah responden. Sementara data sekunder, yaitu data yang diperoleh bersifat kualitatif dari pembahasan kepustakaan dan dokumen-dokumen atau naskah yang diperoleh dari Pemerintah Kota Palu, Departemen Agama Kota Palu, Porum Kerukunan Umat Beragama(FKUB) Kota Palu yang berkenaan dengan penelitian ini.

Sesuai dengan sifat dan jenis penelitian ini yakni penelitian empiris atau *case study and field research* (penelitian kasus dan penelitian lapangan), maka tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini

menggunakan metode kepustakaan, angket, wawancara dan pengamatan.<sup>10</sup>

Studi dokumen atau kepustakaan, yakni penelusuran dokumen dan kepustakaan untuk melihat bukti-bukti tertulis tentang kerukunan antar umat beragama di kota Palu. Penyebaran angket atau kuesioner berupa daftar pertanyaan kepada responden. Metode ini dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kehidupan beragama yang berkenaan dengan kerukunan antar umat beragama berdasarkan perhitungan kuantitatif.

Wawancara, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan mewawancarai responden secara langsung. Wawancara dilakukangan kepada beberapa pejabat Pemerintah kota Palu, Pejabat Pemerintah pada Departemen Agama kota Palu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota Palu, unsure pimpinan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dari Islam, seperti NU, Mumammadiyah, al-Khairat, MUI di Kota Palu. Selain itu, peneliti juga mewawancarai Kristen seperti GKST, GPI, para Pendeta. Begitupun dari unsure pimpinan agama Hindu dan agama Budha.

Pengamatan, metode ini dilakukan dalam rangka mengamati secara langsung aktivitas keberagamaan yang dilakukan oleh masing-masing umat beragama.

Pengolahan data dan analisis data dilaksanakan dengan tahapan secara editing, koding dan tabulasi. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka meneliti jawaban responden yang berkaitan dengan kelengkapan

---

<sup>10</sup> Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin: Yogyakarta, 2000., h.

pengisian kuesioner, keterbacaan tulisan, kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan daa. Koding merupakan kegiatan pemberian kode atau tanda tertentu pada jawaban responden setelah diedit. Sementara tabulasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan data yang telah terkumpul dalam bentuk table.

Adapun analisis data menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisa data yang tidak berupa angka, seperti analisa konflik dan solusi mengatasinya. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan pada data yang terukur.<sup>11</sup>

## **E. Analisi dan Pembahasan Temuan**

### **1. Mengenal Sosial Budaya Masyarakat Palu**

Masyarakat kota palu terdiri dari penduduk asli Kaili dan suku bangsa pendatang yang berasal dari berbagai wilayah seperti, Jawa, Bugis, Makassar, Buton, Gorontalo, Manado, Batak, Padang, Banjar, Suku bangsa yang terdapat di Sulawesi Tengah dan menjadi pendatang di tanah Kaili, seperti Banggai, Saluan, Balantak, Buol, Bungku, Mori dan masyarakat keturunan Cina. Masyarakat keturunan Cina ini sangat diperhitungkan karena menguasai akses ekonomi di kota Palu. Masyarakat kota Palu tergambar sangat heterogen baik dilihat dari segi etnis maupun segi agama. Masing-masing suku pendatang tersebut dilihat dari segi jumlahnya sangat berimbang dengan penduduk suku asli, Kaili. Masyarakat pendatang sebagian mereka membentuk organisasi

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktik*, Cet. I. Rineka Cipta: Jakarta. 2006, h.

paguyuban sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaran dan kekeluargaan. Bahkan terkadang organisasi tersebut dijadikan sebagai kendaraan politik atau sarana kampanye untuk suksesi kepala daerah. Di sisi lain, penduduk asli suku Kaili justru menempati pinggiran kota disebabkan oleh persaingan ekonomi.

Dari dimensi agama, penduduk kota palu juga sangat heterogen. Terdapat agama Islam, Kristen, Hindu, Budha. Namun, dari beberapa agama yang ada, Islamlah agama yang dominan di kota Palu, baik yang diyakini oleh penduduk asli maupun pendatang. Masyarakat Palu sangat religious, setidaknya dapat dilihat dari perilaku keagamaan para penganutnya terutama yang beragama Islam. Indikatornya adalah ketaatan mereka dalam menjalankan kewajiban ibadah dan anjuran agama yang secara langsung maupun tidak langsung yang merupakan upaya internalisasi nilai-nilai agama ke dalam pola perilaku hidup bermasyarakat. Selain itu, organisasi sosial keagamaan juga sangat aktif, seperti Alkhairat, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Organisasi tersebut secara aktif melakukan dakwah keagamaan serta berperan aktif dalam mengajarkan toleransi, kesetaraan dan persamaan dalam kehidupan bermasyarakat serta meningkatkan sikap saling memahami, mengerti dan menghargai antar umat beragama.

## 2. Kondisi Kerukunan Umat Beragama di Kota Palu

Berbagaia peristiwa komplik dan kerusuhan di berbagai daerah bernuansa agama dan etnik di Indonesia, termasuk di Kota Palu memunculkan asumsi bahwa masyarakat di tingkat lokal tidak memiliki dayat tahan yang memadai untuk menciptakan ketertiban sosial. Dalam kondisi demikian, masyarakat tidak berdaya untuk menangkal pengaruh

negative yang datang dari luar yang dapat menimbulkan berbagai konflik dan disintegrasi sosial masyarakat yang bersangkutan.

Kondisi kehidupan beragama di suatu kelompok masyarakat memiliki pengaruh terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan. Semakin taat suatu komunitas dalam menjalankan ajaran agamanya, semakin tertib dan aman kondisi lingkungan komunitasnya. Hal ini terjadi pada komunitas beragama yang ada di Kota Palu Sulawesi Tengah. Kota Palu merupakan daerah yang didiami oleh berbagai suku bangsa dengan memeluk agama yang berbeda-beda.

Berdasarkan agama yang dipeluknya bahwa 85,15 persen penduduk memeluk agama Islam, 9,74 persen memeluk agama Kristen, 2,56 persen memeluk agama Katolik, 0,99 persen memeluk agama Hindu, 1,54 persen memeluk agama Budha. Walaupun penduduk kota Palu sangat heterogen, namun kerukunan hidup beragama nampaknya sangat terjaga dengan baik, sehingga hubungan antar umat beragama nampaknya sangat terjalin dengan mesra. Hal ini terlihat dari tumbuhnya fasilitas peribadatan bagi semua pemeluk agama dan bertambahnya rohaniawan masing-masing agama.

Meskipun di kota Palu agama Islam merupakan agama yang mayoritas dan jumlah ibadah lebih banyak daripada agama-agama lain, namun dalam kehidupan masyarakat tetap terjaga kerukunan dan toleransi. Selain itu, setiap agama tetap memiliki rohaniawan yang dianggap memiliki peran penting dalam menjaga kedamaian di kota Palu. Rohaniawan tersebut telah berfungsi secara efektif mendakwakan agamanya masing-masing dengan penuh keterbukaan dan saling menghormati antar sesama penganut agama yang menjalankan ibadahnya. Tokoh agama baik Islam, Kristen, Hindu, dan Budha sama-

sama memberikan dakwah dan menyampaikan dakwah secara damai dan toleran. Mereka juga acapkali melakukan pertemuan bersama untuk berkomitmen menyampaikan pesan-pesan agama yang menyejukkan kepada umat masing-masing.

Huubungan formal maupun informal para tokoh agama di kota Palu sangat terjalin dengan baik. Ini dilakukan pada saat pertmuan dan dialog anta tokoh agama yang dilakukan oleh pemerintah secara formal dan saling kunjung mengunjungi antat tokoh agama meskipun intensitasnya sangat sedikit. Hubungan antar warga masyarakat yang berbeda agama terjalin dengan harmonis dalam kehidupan masyarakat. Misalnya dalam kehidupan bertetangga, masyarakat saling percaya dan saling menghormati satu sama lain. Tidak ada yang merasa terancam oleh gangguan agama lain. Bahkan dalam upacara-upacara sosial masyarakat seperti perkawinan di antara sesame tetangga yang berbeda agama, mereka saling tolong menolong dan saling mengundang. Demikian yang digambarkan oleh Faisal Attamimi, Sekretaris FKUB Kota Palu dan Sekretaris MUI Kota Palu bahwa kehidupan antar tetangga terjalin sangat harmonis terlihat dalam setiap acara upacara perkawinan dan acara kematian.<sup>12</sup> Kerukunan hidup antar-umat beragama di kota Palu tercipta dengan baik. Perbedaan agama tidak menjadi kendala bagi mereka untuk berkomunikasi dan berhubungan antar umat agama yang berbeda. Hal ini terjadi karena doktrin agama yang diterima oleh mereka tidak menyeru untuk mempersoalkan perbedaan. Justru, perbedaan diantara mereka dipahami sebagai sesuatu yang wajar dan niscaya.

---

<sup>12</sup> Wawancara, tanggal 25 September 2015 di Palu.

Sehingga, secara umum dapat dikatakan bahwa suasana kehidupan beragama di kota Palu menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Hal ini terlihat dari aktivitas pemeluk agama-agama yang sangat aktif. Misalnya gotong royong dan kerjasama, dialog antar umat beragama yang terlihat kompak dan baik. Persoalan ini tentu tidak lepas dari peran tokoh agama, masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan kerukunan. Mereka sering mengadakan pertemuan-pertemuan antar umat beragama, dialog dan beberapa kegiatan yang mengarah pada terciptanya kerukunan kehidupan antar umat beragama. Perkumpulan tersebut diwadahi oleh Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Palu yang dibentuk oleh Kementerian Agama Kota Palu yang diketuai oleh Drs. Ismail Pangeran, M.Pd.I. Begitupun dengan tokoh agama dari Alkhairat yang dikenal sangat terbuka dan mempunyai massa organisasi yang jelas sampai ke grass root. Forum ini secara rutin melakukan pertemuan dan menyikapi berbagai hal tentang perkembangan umat beragama di kota Palu.

Bukti empiris dari kerukunan hidup antar umat Beragama di kota Palu adalah saling menghormati hari besar masing-masing agama dengan cara ikut berpartisipasi dan merayakannya, seperti sama-sama membangun jembatan atau kerja bakti, memakamkan jenazah dalam tempat pemakaman yang sama, dan memberi nama modin bagi perawat jenazah beragama Kristen (modin Kristen) dan pernikahan antar-umat beragama.

Selain itu, menurut Drs. H. Kiflin Pajala, M.Pd.I Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu, menyatakan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di kota Palu juga tergambarkan dalam bentuk kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran sebagai kegiatan umat Islam. Dalam kegiatan



MTQ tersebut, diundang pihak agama non muslim sebagai agama sahabat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Begitupula agama Kristen, dalam acara MTQ, mereka diundang untuk kegiatan pesparawi. Hal ini rutin dilakukan dalam setiap kegiatan MTQ tingkat Kota Palu.<sup>13</sup> Suasana kehidupan beragama di kota Palu menunjukkan suasana yang menggembirakan, dimana antara agama satu dengan yang lain saling memperlihatkan kehidupan yang harmonis. Tidak ada konflik yang muncul, bahkan ketika marak terjadi konflik dan kerusuhan yang bermuatan agama di beberapa daerah di Indonesia, terutama kerusuhan Poso yang menjadi tetangga kota. Kota Palu tidak terpengaruh dengan keadaan kasus kerusuhan Poso, dengan berbagai rentetan peristiwa kekerasan di Poso dan Sulawesi Tengah pada umumnya, dan bahkan sejak pelaku kerusuhan Poso ditangkap dan kemudian dieksekusi di kota Palu pada tanggal 28 September 2006. Kekerasan dan kerusuhan tersebut tidak terjadi di masyarakat, bahkan para tokoh agama menjalin kerjasama yang baik dan melaksanakan dialog serta beberapa pertemuan. Dalam pandangan Jimmy Dumanau, tokoh agama Kristen, bahwa gereja memandang masalah-masalah kebersamaan antaragama haruslah dihormati dan saling bantu membantu, memberi kasih sayang kepada sesama merupakan doktrin gereja dalam menebarkan penghormatan dan kerukunan antar sesama manusia yang beragama.<sup>14</sup> Begitupula dalam pandangan Drs. Ismail Pangeran, M.Pd.I ketua FKUB kota Palu, bahwa pandangan keagamaan yang memberikan ruang kepada toleransi sangat penting dimasyarakatkan, agar apa yang disebut menghubungkan tali

---

<sup>13</sup> Wawancara, tanggal, 29 September 2015 di Palu.

<sup>14</sup> Wawancara, tanggal 2 September 2015 di Palu.

kasih sayang antarumat beragama menjadi sesuatu yang mungkin dilakukan tanpa batas dan hambatan teologis.<sup>15</sup>

Terciptanya kerukunan seperti di atas disebabkan beberapa faktor, diantaranya:

a. Faktor tradisi

Sejak nenek moyang dulu warga masyarakat kota Palu dikenal sebagai masyarakat terbuka, sudah hidup dalam suasana rukun dan aman. Sebagaimana pada umumnya masyarakat yang lain, kehidupan kota yang sudah lebih modern akan tetapi penduduk kota Palu lebih bercirikan paguyuban, bahu-membahu dan tolong menolong. Faktor inilah yang kemudian mewarnai hidup antar-umat beragama. Mereka tidak pernah mempersoalkan symbol-simbol dalam interaksi sosialnya.

b. Faktor alisan dan mazhab

Di kota palu, gereja yang dominan adalah gereja yang moderat, yaitu gereja protestan. Gereja tersebut lebih terbuka dan moderat. Keterbukaan dan moderasi tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kerja sama yang dilakukan dengan masyarakat muslim dalam membentuk kerukunan hidup antar-umat beragama. Sementara dari kalangan Ilam kelompok yang paling dominan adalah warga Alkhairat yang merupakan organisasi keagamaan tertua di Sulawesi Tengah dan Indonesia Timur memiliki pandangan yang moderat dan terbuka yang secara geneologis telah diwariskan oleh pendiri Alkhairat Habi Sayyed Idrus bin Salim Aljufrie. Selain itu, organisasi dan kultur yang sama yaitu Nahdlatul

---

<sup>15</sup> Wawancara, tanggal 7 September 2015 di Palu.

Ulama (NU) juga memiliki pandangan terbuka dan moderat dalam bergaul dengan agama lain.

c. Faktor dakwah dan misi

Dakwah dan misi yang disampaikan oleh pendeta maupun muballig di kota Palu menitikberatkan pada misi kemanusiaan, kerja sosial dan pemberdayaan masyarakat, bukan dakwah yang menonjolkan fanatisme dan perbedaan agama. Contoh konkret adalah Fredy F. Follo, ketua Badan Kerjasama Umat Kristiani di kota Palu, menyatakan bahwa peran seorang pendeta dalam melerai konflik antar-umat beragama adalah ketika memberikan ceramah pada jemaatnya. Kata pendeta kepada jemaatnya “Kalau gereja dibakar jangan marah, karena kalau gereja dibakar kita masih bisa membangun lagi, kita tidak perlu dendam dan marah dan tidak perlu terprovokasi, kita serahkan masalah ini kepada proses hukum.”<sup>16</sup>

d. Faktor kerjasama

Adanya kerjasama antar tokoh agama dengan umat, antar tokoh agama serta tokoh agama dengan pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk dialog sehingga berdampak positif pada kerukunan antar umat beragama. Selain itu, pendekatan yang digunakan para tokoh agama untuk mewujudkan kerukunan adalah bersifat cultural dan etis, tidak structural dan politis. Faktor keterbukaan antar-umat beragama yang pada akhirnya membentuk persepsi dalam diri masing-masing umat bahwa

---

<sup>16</sup> Wawancara, tanggal 10 September 2015 di Palu.

perbedaan agama merupakan hal yang wajar dan merupakan kekuatan.

e. Faktor kondisi sosial-ekonomi

Faktor sosial-ekonomi di kota Palu secara umum memperlihatkan hal yang baik meskipun tidak tergolong tinggi. Artinya masyarakat secara rata-rata hidup dalam kondisi yang baik dan sejahtera. Hal ini tentu juga sangat mempengaruhi kondisi dan suasana kerukunan hidup antar-umat beragama. Boleh jadi kerukunan yang tercipta di kota Palu disebabkan oleh komunitas beragama, khususnya Islam, masih pada tingkat paguyuban. Dengan demikian, mereka tidak memperdulikan batas wilayah agama yang sacral, ritual dan yang bersifat sosial.

Singkatnya bahwa di kota Palu, komunitas beragama justru mampu menggerakkan nilai-nilai sosial yang dibangun melalui program pemerintah dan tokoh agama, sehingga interaksi agama dengan unsure etnis tidak menghasilkan ketegangan melainkan kerukunan itu sendiri. Di kota Palu juga nampaknya tidak terjadi politisasi agama. Ada hubungan baik antara kerukunan hidup antar umat beragama dengan ketaatan umat beragama terhadap tokohnya. Jika para umat Beragama taat kepada tokohnya, akan tercipta suasana yang harmonis di antara umat beragama dalam mewujudkan cita-cita agamanya. Kondisi inilah yang tergambar dalam komunitas antar-umat beragama di kota Palu.

### 3. Peran dan Fungsi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Palu

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan forum dan wadah bagi pemuka agama dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

FKUB merupakan organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan yang dibentuk atas kesamaan agama dan tujuan yang sama yakni untuk mewujudkan suasana sosial yang harmonis bagi umat beragama.

Sejauh ini Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota Palu telah merumuskan telah merumuskan berbagai program dengan pengembangan di beberapa aspek. Diantaranya adalah; 1) peningkatan kapasitas kelembagaan dan penataan organisasi; 2) peningkatan kesejahteraan sosial, ketahanan budaya dan pelayanan keagamaan; 3) peningkatan kesadaran hukum dan politik bagi umat beragama; 4) peningkatan dalam mengorganisir sumber-sumber pembiayaan organisasi melalui sistem pengembangan jaringan dana yang maksimal. Upaya itu dilakukan berdasarkan visi FKUB kota Palu, yakni “Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Toleran, Demokratis, dan Berkeadilan di Kota Palu yang dilandasi kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Program tersebut belum dapat dilaksanakan oleh FKUB kota Palu secara maksimal. Kendala yang dihadapi oleh pengurus adalah dana yang sangat minim untuk melaksanakan program yang telah dirancang. Selain itu, para pengurus juga masih sebatas rapat kerja yang belum ditindaklanjuti melalui aksi nyata di masyarakat. Dari sini dapat dilihat bahwa secara organisatoris FKUB kota Palu belum memiliki kinerja organisasi yang efektif dan efisien.

Sementara, masalah kemajemukan dalam bangsa dan mengelola kerukunan serta memiliharnya sangat penting dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat. Kerusakan yang terjadi sebenarnya bukan karena sentiment keagamaan, melainkan lebih pada sentiment politik dan ekonomi. Agama selanjutnya terkadang dijadikan pemicu oleh oknum

yang kurang bertanggungjawab. Padahal seluruh agama mengajarkan kemanusiaan dan ketaan hukum.

Dalam pelaksanaan kerukunan umat beragama, peran penting FKUB termasuk dalam pendirian rumah ibadah. FKUB memberikan rekomendasi terhadap pendirian rumah ibadah. Selain itu, menurut As'ad Syukur (tokoh organisasi DDI di Palu) bahwa peran FKUB selama ini sangat strategis dalam kerukunan umat beragama sebagai FKUB sebagai perekat bangsa. Tidak hanya sekedar pemadam kebakaran. Maka dari itu, FKUB diharapkan mampu merapatkan barisan untuk merealisasikan program-programnya. Dan pemerintah wajib mendukung FKUB meskipun masih dianggap sebagai organisasi biasa.<sup>17</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Sahdan Senen, tokoh masyarakat muslim, bahwa FKUB memiliki peran begitu strategis dalam menjaga kerukunan umat beragama, akan tetapi masih kurang perhatian pemerintah dalam memberikan bantuan financial, ditambah lagi sebagian pengurus belum memahami fungsi pokok FKUB dalam masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara: tanggal 12 September 2015 di Palu.

<sup>18</sup> Wawancara: tanggal 13 September 2015 di Palu.

TABEL 1  
 PENGURUS FKUB YANG MEMAHAMI TUGAS DAN FUNGSINYA

NO	Jawaban Responden	Frekwensi (F)	Porsentase %
1	Memahami	65	65
2	Kurang memahami	25	25
3	Tidak memahami	10	10
	Jumlah Responden	100	100

Sumber: diolah dari hasil kuisoner tahun 2015

Berdasarkan data hasil olahan kuisoner menunjukkan bahwa pengurus FKUB yang memahami tugas dan fungsinya dalam pembinaan umat beragama dalam pandangan masyarakat berjumlah 65%, sementara yang kurang memahami 25 % dan yang tidak memahami hanya 10%. Dari prosentase tersebut tergambar bahwa pengurus yang memahami tugas dan fungsinya masih lebih banyak daripada yang belum, meski demikian, sejatinya seluruh pengurus benar-benar memahami apa yang seharusnya dikerjakan. Maka dari itu, sangat mendesak dilakukan upgrading pengurus untuk memahami fungsi dan tugas masing-masing.

Adapun kendala FKUB yang terkait dengan dukungan pemerintah yang bersifat materi memang sangat penting untuk diperhatikan. Karena kehadiran FKUB sangat penting dan mendukung pemerintah dalam meningkatkan kedamaian dan kerukunan di masyarakat. Berdasarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan

Wakil Kepada Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah dinyatakan bahwa FKUB dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai tugas dan fungsi Kepada Daerah dalam membina kerukunan dan pelayanan umat beragama.

Selain itu, FKUB juga belum efektif melaksanakan tugasnya dalam mengkomunikasikan berbagai hal mengenai kerukunan umat beragama kepada masyarakat dan umat beragama. Kondisi itu tergambar dari pernyataan masyarakat terhadap FKUB terkait dengan signifikansi tugas dan fungsinya terhadap kerukunan umat beragama di kota Palu. Sebagaimana dalam table di bawah ini:

Tabel 2

Signifikansi Peran FKUB terhadap Kerukunan Umat Beragama di Kota Palu

NO	Jawaban responden	Frekwensi (F)	Porontase %
1	Memiliki hubungan	35	35
2	Kurang berhubungan	55	55
3	Tidak tahu	10	10
	Jumlah responden	100	100

Sumber: diolah dari hasil kuisioner tahun 2015

Pada table di atas terlihat bahwa masyarakat belum melihat peran yang signifikan bagi organisasi FKUB dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Terdapat 55 % jawaban responden yang menyatakan bahwa



peran FKUB terhadap kerukunan umat beragama di kota Palu kurang berhubungan. Ini artinya bahwa masyarakat belum memercayai bahwa FKUB Kota Palu berperan dalam kerukunan umat beragama terutama dalam mendamaikan masyarakat yang bertikai termasuk umat beragama.

Dengan demikian, sebaiknya FKUB mulai saat ini bermasyarakat dengan semua umat beragama. Kurangnya signifikansi peran FKUB terhadap pembinaan kerukunan umat beragama bisa saja disebabkan oleh tinggi dan rendahnya FKUB kota Palu dalam merespon masalah-masalah umat beragama di masyarakat. Sebagaimana tergambar dalam table di bawah ini:

Table 3

Respon FKUB terhadap Permasalahan Umat Beragama di Kota Palu

NO	Jawaban responden	Frekwensi (F)	Porentase %
1	Tinggi	20	20
2	Rendah	55	55
3	Tidak ada	25	25
	Jumlah responden	100	100

Sumber: diolah dari hasil kuisioner tahun 2015

Dari table di atas menunjukkan bahwa FKUB kota Palu masih kurang merespon berbagai permasalahan umat beragama. Terdapat 55 % responden yang menyatakan bahwa FKUB kota Palu masih rendah dalam merespon kondisi sosial keagamaan masyarakat. Respon itu misalnya berupa pernyataan di media massa, berdialog dengan masyarakat yang

bertikai, berdialog dengan umat beragama dengan memahami dan menindaklanjuti masalahnya yang berkembang di masyarakat dan umat beragama. Kurangnya FKUB terhadap kondisi sosial umat beragama, karena FKUB berdialog dengan umat beragama di Kota Palu. Hal ini juga berdampak pada peran FKUB kota Palu di tengah-tengah masyarakat umat beragama. Sebagaimana terlihat dalam table di bawah ini:

Tabel 4

Peran FKUB Kota Palu dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Palu

NO	Jawaban responden	Frekwensi (F)	Porsentase %
1.	Tinggi	20	20
2.	Rendah	65	65
3.	Kurang	15	15

Sumber: diolah dari hasil kuisioner 2015

Berdasarkan table di atas, maka terdapat 65% masyarakat menyatakan bahwa peran FKUB kota Palu masih rendah terhadap pembinaan kerukunan umat beragama. Ini berarti bahwa kondisi sosial keagamaan yang terjadi di kota Palu yang berjalan dengan aman dan damai karena memang diciptakan oleh masyarakat sendiri dan umat beragama secara individu. Masyarakat telah memiliki kesadaran yang tinggi terhadap penciptaan kondisi yang aman dan damai. Selain itu, pemerintah juga secara terus menerus melakukan penciptaan kondisi

sosial masyarakat yang baik melalui pelaksanaan program pelayanan keagamaan dan aspek sosial lainnya dalam masyarakat.

#### 4. Efektifitas Kebijakan Kerukunan Umat Beragama Melalui FKUB Kota Palu

Sebagai suatu kebijakan dalam pembinaan kerukunan umat beragama di kota Palu, maka pembentukan wadah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dilaksanakan sebagai wadah membangun komunikasi dan interelasi bagi semua umat beragama. Wadah ini menjadi sangat penting dan strategis dalam membangun kerukunan antar umat beragama dan antar suku dan etnik di kota Palu.

Namun, dalam perjalanan FKUB, sebagai wadah komunikasi antar umat beragama belum berjalan secara efektif karena fungsi dan peran FKUB kota Palu belum maksimal memfasilitasi berbagai dialog antar umat beragama dan antar etnis serta suku bangsa yang ada di kota Palu. Selain itu, secara intitusional belum maksimalnya perhatian pemerintah untuk memberdayakan forum komunikasi tersebut.

Dalam studi efektifitas kebijakan, maka kebijakan kerukunan umat beragama dapat diukur melalui beberapa hal, yakni: a) regulasi kebijakan kerukunan umat beragama di kota Palu; b) peran institusi keagamaan dan kemasyarakatan di kota Palu; c) kesadaran masyarakat terhadap penciptaan kerukunan umat beragama di kota Palu.

Ketiga aspek tersebut dapat dilihat dalam realitasnya di kota Palu, bahwa belum adanya regulasi hukum dalam hal ini peraturan daerah yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama di kota Palu. Peraturan Daerah ini, untuk mengatur kehidupan kerukunan antar umat beragama di kota Palu. Saat ini kebijakan kerukunan umat beragama di kota Palu

didasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Adat.

Menurut Peraturan Bersama ini, bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama. Salah satu upaya pemerintah dan masyarakat dalam pemberdayaan kerukunan umat beragama adalah dengan membentuk wadah yang disebut Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Palu dengan rincian tugas menurut Peraturan Bersama ini adalah:

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota.
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pembedayaan masyarakat.
5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Berdasarkan rincian tugas FKUB tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa FKUB Kota Palu belum secara efektif melakukan tugas-tugas pelayanan dan pembedayaan kerukunan umat beragama. Berkaitan dengan FKUB sebagai wadah silaturahmi dan komunikasi antar umat beragama, FKUB Kota Palu juga belum pernah menerima aspirasi

yang berkaitan dengan masalah kerukunan umat beragama dari organisasi kemasyarakatan dan keagamaan di Kota Palu. Hal ini disebabkan oleh masing-masing organisasi keagamaan dan kemasyarakatan di Kota Palu berjalan secara sendiri-sendiri dan kurang berkomunikasi dengan FKUB Kota Palu. FKUB Kota Palu selama kurun waktu 2008-2015 belum melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan perangkat hukum lainnya yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama di Kota Palu dan melakukan pemberdayaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama di kota Palu.

Dengan demikian, tugas FKUB yang diamanahkan melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri belum efektif dilakukan oleh FKUB Kota Palu.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kondisi kehidupan beragama di suatu kelompok masyarakat memiliki pengaruh terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan. Semakin taat suatu komunitas dalam menjalankan ajaran agamanya, semakin tertib dan aman kondisi lingkungan komunitasnya. Hal ini terjadi pada komunitas beragama yang ada di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kota Palu merupakan daerah yang didiami oleh berbagai suku bangsa dengan memeluk agama yang berbeda-beda. Berdasarkan agama, bahwa 85,15 persen penduduk beragama Islam, 9,74 persen yang beragama Kristen, 0,99 persen beragama Hindu dan 1,54 persen yang beragama Budha. Walaupun penduduk kota Palu sangat heterogen, namun kerukunan hidup beragama nampaknya sangat terjaga dengan baik, sehingga hubungan antar umat beragama terjalin mesra. Hal ini

**Sidik Ibrahim, *Efektivitas Kebijakan Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama...***

terlihat dari tumbuhnya fasilitas peribadatan bagi semua pemeluk agama dan bertambahnya jumlah rohaniawan masing-masing agama.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) belum secara maksimal berperan dalam pembinaan kerukunan umat beragama di Kota Palu. Hal ini terlihat pada program yang telah dirumuskan akan tetapi belum bisa dikerjakan oleh FKUB Kota Palu secara maksimal

Kebijakan kerukunan Umat Beragama yang dilaksanakan melalui FKUB Kota Palu belum secara efektif terlaksana secara maksimal. Hal ini terlihat dalam tugas dan fungsi FKUB berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan 9 tahun 2006 belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif.

### **Daftar Pustaka**

Abdurrahman Wahid dkk., 1994. *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, Yogyakarta: pustaka Pelajar.

-----, 1999. *Agama dan Kekerasan, Dari Anarkisme Politik ke Teologi Kekerasan*, Elsas, Jakarta.

Amin Abdullah, 2000. *Dinamika Islam Kultural, Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer*, Bandung: Mizan.

Azhar Arsyad dan Jawahir Thontowi, 2002. *Islam dan Perdamaian Global*, Yogyakarta: Madyan Press.

Ahmad Syahid dan Zainuddin Daulay, 2002. *Riuh Diberanda Satu: Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Agama Departemen Agama Republik Indonesia.

Ali Munhanif, 1996. *Islam and The Struggle for Religious Pluralisme in Indonesia: A Politica Reading of The Religious Thought of Mukti*

Ali, dalam Studi Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies, Volume 3, No. 1

- Abu Achmadi, 2002. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Bahtiar Effendi, 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina.
- Bryan S. Turner, 1991. *Religion and Social Theory*, Sage Publication Ltd. London.
- Charles Kurzman, 2001. *Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, Jakarta: Paramadina
- Darmawan Mas'ud Rahman, 2004. *Nilai Budaya dan Konflik, (Sebuah Kajian singkat diamati dari Sudut Pandang Budaya Kekinian)*, Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari STAIN Datokarama Palu.
- Faisal Ismail, 2002. *Pijar-pijar Islam Pergumulan Kultural dan Struktural*, Jakarta: Litbang Depag RI.
- Hasan Hanafi, 1981. *Madha Ya'ni al Yasar al-Islami: Al-Yasar al-Islami Kitabat fi al-Nahdla al-Islamiyah*.
- Luthfi Assyaukanie, 2002. *Wajah Liberal Islam di Indonesia*, Jakarta: Jaringan Ilam Liberal.
- Magraret M. Paloma, 1979. *Comtemporary Socilogy Theory*, Yogyakarta: Yosogama.
- Nurkholis Madjid, 1992. *Islam doktrin dan Peradaban*, Cet. III, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Neong Muhajir, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin: Yogyakarta
- Scott Gordon, 1997. *The History and Philosphy of Social Scince*, London: Routledge.

**Sidik Ibrahim**, *Efektivitas Kebijakan Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama...*

Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktik*, Cet. I. Rineka Cipta: Jakarta.

Ridwan Lubis, 2005. *Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Depag RI, Jakarta.

Thomas Meyer, 2004. *Politics of Identity The Challenge of Modern Fundamentalism*, Jakarta: Freindrich Ebert Stiftung.

Qowaid, 1997. *Kehidupan Umat Beragama di Tengah Masyarakat yang Berubah*, Jakarta: Puslitbang Agama Departemen Agama Republik Indonesia.